

**ANALISIS COST-BENEFIT PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Monica Ellya Yuliawan¹, Wilma Silalahi²

monica.205230213@stu.untar.ac.id¹, wilmasilalahi@fh.untar.ac.id²

Universitas Tarumanagara

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi di bidang gizi dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan program MBG dari perspektif cost-benefit dengan menilai perbandingan antara biaya yang dikeluarkan negara dan manfaat yang dihasilkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis kebijakan berbasis studi literatur dari berbagai jurnal dan laporan resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya memberikan dampak langsung berupa peningkatan asupan gizi peserta didik, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan konsentrasi belajar, kehadiran sekolah, dan kualitas kesehatan generasi muda secara keseluruhan. Dari sisi ekonomi, program ini memiliki efek pengganda melalui keterlibatan sektor pertanian, peternakan, dan industri pangan lokal. Meskipun membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, manfaat jangka panjang berupa peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pengurangan beban biaya kesehatan dinilai dapat memberikan nilai ekonomi yang signifikan bagi negara. Program MBG dapat dipandang sebagai bentuk investasi sosial yang relevan dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, dengan catatan bahwa optimalisasi pelaksanaannya melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, serta sinergi antar sektor menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.

Kata Kunci: Makan Bergizi Gratis, Cost-Benefit Analysis, Sumber Daya Manusia, Kebijakan Publik, Investasi Sosial.

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is one of the government's strategic policies to improve human resource quality through interventions in nutrition and education. This study analyzes the feasibility of the MBG program from a cost-benefit perspective by assessing the comparison between state expenditures and the benefits generated, both in the short and long term. The research employs a normative juridical method with a conceptual approach and policy analysis based on a review of academic journals and official reports. Findings indicate that the MBG program not only provides direct benefits in the form of improved nutritional intake among students, but also contributes to better learning concentration, increased school attendance, and the overall health quality of younger generations. From an economic perspective, the program generates multiplier effects through its engagement with agriculture, livestock, and local food industry sectors. Although the program requires substantial public funding, its long-term benefits including enhanced workforce productivity and reduced healthcare expenditures—suggest a significant economic return for the state. The MBG program can be understood as a form of social investment relevant to human resource development in Indonesia, provided that its implementation is optimized through stronger governance, budget efficiency, and cross-sector collaboration.

Keywords: Free Nutritious Meal Program, Cost-Benefit Analysis, Human Capital, Public Policy, Social Investment.

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia merupakan pondasi yang tidak bisa diabaikan dalam strategi pembangunan nasional jangka panjang. Kualitas manusia memiliki peran krusial dalam menentukan daya saing suatu bangsa, sekaligus menjadi penentu keberhasilan transisi dari pertumbuhan ekonomi yang berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis

pengetahuan. Dalam konteks Indonesia, tantangan yang masih dihadapi berkaitan erat dengan persoalan gizi, ketimpangan akses pendidikan, serta rendahnya kualitas kesehatan anak usia sekolah.¹

Data menunjukkan bahwa angka stunting di Indonesia, meskipun telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, masih berada pada level yang mengkhawatirkan dibandingkan rata-rata negara Asia Tenggara. Kondisi ini bukan sekadar persoalan medis, melainkan menyentuh ranah sosial dan ekonomi yang lebih luas. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi gizi buruk cenderung mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif, yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan belajar dan produktivitas mereka di masa depan.²

Merespons kondisi tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program unggulan dalam Asta Cita. Program ini dirancang untuk memberikan akses makanan bergizi kepada peserta didik mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, sekaligus menjangkau ibu hamil dan ibu menyusui sebagai kelompok sasaran yang lebih luas.³

Dari sisi hukum, keberadaan program MBG memperoleh landasan normatif melalui berbagai regulasi yang mengamanatkan negara untuk hadir dalam pemenuhan hak atas pangan dan pendidikan bagi warganya. Pasal 28C UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menggariskan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dan menjamin ketersediaan pangan yang bergizi bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴

Dari sisi ekonomi, implementasi program MBG melibatkan berbagai sektor pendukung, mulai dari pertanian, peternakan, hingga industri pengolahan pangan. Keterlibatan rantai pasok yang cukup panjang ini membuka peluang terjadinya efek pengganda yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi UMKM dan koperasi yang menjadi mitra penyediaan bahan baku.⁵

Namun, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program ini yang pada tahun 2025 mencapai Rp71 triliun dan direncanakan meningkat signifikan pada tahun-tahun berikutnya memunculkan pertanyaan kritis mengenai efisiensi dan efektivitasnya. Apakah manfaat yang dihasilkan sebanding dengan besarnya biaya yang dikeluarkan negara? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan di tengah tekanan fiskal dan banyaknya prioritas pembangunan lain yang juga membutuhkan perhatian.⁶

Pendekatan cost-benefit analysis menjadi instrumen analitis yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Melalui kerangka ini, dapat dilakukan penilaian yang lebih terukur

¹Riskesmas 2018, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan prevalensi stunting nasional masih mencapai 30,8%. Angka ini berangsur turun namun belum mencapai target RPJMN 2020-2024 sebesar 14%.

²UNESCO, 'Education for All Global Monitoring Report', 2023, menyatakan bahwa keterkaitan antara status gizi anak dan capaian pendidikan merupakan hubungan dua arah yang saling memperkuat.

³Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional menjadi landasan hukum pembentukan lembaga yang mengoordinasikan pelaksanaan program MBG.

⁴Badan Gizi Nasional, 'Pedoman Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis', Jakarta: BGN, 2025, hlm. 12.

⁵INDEF, 'Analisis Dampak Ekonomi Program MBG terhadap Sektor Pangan Lokal', Jakarta: INDEF, 2024, hlm. 8.

⁶Kementerian Keuangan RI, 'Nota Keuangan APBN 2025', Jakarta: Kemenkeu, 2025, menyebutkan alokasi anggaran MBG mencapai Rp71 triliun pada tahun anggaran 2025.

terhadap manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan program, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta perbandingannya dengan biaya yang ditanggung oleh negara.⁷

Studi-studi internasional sebelumnya telah membuktikan bahwa program pemberian makanan di sekolah memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan status gizi, kehadiran, dan capaian akademik peserta didik. Pengalaman dari negara-negara seperti Brasil dengan program PNAE, India dengan Mid-Day Meal Scheme, dan berbagai negara Afrika sub-Sahara memberikan bukti empiris yang cukup kuat mengenai efektivitas program serupa.⁸

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas cost-benefit dari program MBG dalam konteks hukum dan kebijakan publik Indonesia masih sangat terbatas. Celah inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis kebijakan, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai nilai strategis program MBG sebagai investasi negara dalam pembangunan sumber daya manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dan kebijakan sebagai instrumen pengaturan kehidupan bermasyarakat.⁹

Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah regulasi secara formal, tetapi juga mengkaji bagaimana kebijakan public dalam hal ini Program MBG berfungsi sebagai mekanisme negara dalam memenuhi amanat konstitusi di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Dua pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengoperasionalkan konsep cost-benefit analysis sebagai alat evaluasi kebijakan, termasuk mengadaptasi kerangka analisisnya ke dalam konteks kebijakan sosial di Indonesia.¹¹

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum program MBG, mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis pelaksanaan. Penelaahan ini penting untuk memastikan bahwa program MBG memiliki legitimasi hukum yang kuat sekaligus memahami batasan normatif dalam pelaksanaannya.¹²

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan resmi pemerintah, serta publikasi dari lembaga negara yang berkaitan dengan program MBG. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel akademik yang relevan, termasuk studi perbandingan dari negara lain. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep teknis dalam penelitian.

⁷Anthony E. Boardman, et al., 'Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice', 5th Edition, Cambridge University Press, 2018, hlm. 7-9.

⁸World Food Programme, 'State of School Feeding Worldwide 2023', Rome: WFP, 2023, mencatat lebih dari 418 juta anak di dunia mendapatkan manfaat dari program makan sekolah.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 'Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat', Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 14.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum', Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 55-57.

¹¹Riant Nugroho, 'Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan', Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018, hlm. 134.

¹²Creswell, J.W., 'Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches', 4th Ed., Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014, hlm. 185.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) secara sistematis, dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis hubungan antara biaya yang dikeluarkan dalam program MBG dan manfaat yang dihasilkan, serta menginterpretasikannya dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. MBG sebagai Instrumen Human Capital Investment

Teori human capital yang dikembangkan Gary Becker menyatakan bahwa investasi pada manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan Kesehatan memberikan imbal hasil yang dapat diukur secara ekonomi, tidak berbeda dengan investasi pada modal fisik.¹³

Dalam kerangka ini, program MBG dapat dipahami bukan sebagai pengeluaran konsumtif semata, melainkan sebagai investasi produktif yang hasilnya baru akan terasa secara penuh dalam rentang waktu yang lebih panjang. James Heckman, pemenang Nobel Ekonomi, telah memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa investasi pada anak usia dini memberikan rate of return yang jauh lebih tinggi dibandingkan investasi pada tahap kehidupan yang lebih lanjut.¹⁴

Kaitan antara status gizi dan perkembangan kognitif anak sudah cukup mapan dalam literatur ilmu gizi dan psikologi perkembangan. Kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, zinc, dan yodium pada usia sekolah diketahui berdampak negatif terhadap fungsi otak dan kemampuan belajar. Intervensi gizi yang terstruktur, seperti yang ditawarkan oleh program MBG, dapat memitigasi risiko tersebut sekaligus mendukung capaian akademik yang lebih optimal.¹⁵

Lebih dari sekadar urusan gizi, MBG juga berdimensi pendidikan yang cukup kuat. Penelitian dari berbagai negara berkembang membuktikan bahwa program makan sekolah secara konsisten berkontribusi pada peningkatan angka kehadiran dan penurunan angka putus sekolah, khususnya di kalangan anak perempuan dari keluarga prasejahtera.¹⁶

Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan ketimpangan akses pendidikan antarwilayah, dimensi ini menjadi sangat relevan. Program MBG dapat berfungsi sebagai insentif bagi keluarga kurang mampu untuk mempertahankan anak-anak mereka di bangku sekolah, sekaligus mengurangi beban biaya konsumsi harian yang selama ini menjadi salah satu faktor penarik anak ke luar dari sistem pendidikan.¹⁷

Penting pula untuk mempertimbangkan dimensi jangka panjang dari program ini. Generasi yang tumbuh dengan status gizi baik dan pendidikan yang lebih berkualitas akan membentuk angkatan kerja yang lebih produktif di masa depan. Dalam proyeksi jangka panjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini berpotensi mendukung percepatan

¹³Gary S. Becker, 'Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education', 3rd Ed., Chicago: University of Chicago Press, 1994, hlm. 11.

¹⁴James Heckman, 'Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children', *Science*, Vol. 312, 2006, hlm. 1900-1902.

¹⁵Harold Alderman dan Derek Headey, 'The relative nutritional importance of different expenditures on children under two', *Economics & Human Biology*, Vol. 26, 2017, hlm. 18-27.

¹⁶UNICEF, 'The State of the World's Children 2024: The Future of Childhood in a Changing World', New York: UNICEF, 2024, hlm. 67.

¹⁷Paul Glewwe dan Michael Kremer, 'Schools, Teachers, and Education Outcomes in Developing Countries', dalam: Eric Hanushek dan Finis Welch (eds.), *Handbook of the Economics of Education*, Vol. 2, Amsterdam: Elsevier, 2006, hlm. 945.

pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta persaingan global sebuah sasaran yang secara eksplisit tertuang dalam Visi Indonesia 2045.¹⁸

2. Efek Pengganda Ekonomi: Melampaui Aspek Gizi

Salah satu dimensi yang kerap luput dari perhatian dalam diskusi tentang program MBG adalah efek penggandanya terhadap perekonomian lokal. Program dengan skala sebesar ini yang menyentuh puluhan juta penerima manfaat di seluruh pelosok Indonesia niscaya menggerakkan rantai pasok yang panjang dan melibatkan banyak pelaku ekonomi.

Kajian INDEF memperkirakan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui program MBG berpotensi menghasilkan output ekonomi yang berlipat melalui mekanisme pengganda (multiplier). Keterlibatan sektor pertanian dan peternakan sebagai pemasok bahan baku utama menciptakan permintaan yang lebih stabil bagi para petani dan peternak lokal, yang selama ini kerap terjerat pada ketidakpastian harga di tingkat produsen.¹⁹

Efek ini tidak berhenti di sektor hulu. Industri pengolahan pangan, usaha katering, dan pelaku UMKM yang terlibat dalam penyediaan dan distribusi makanan juga ikut merasakan manfaatnya. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, program MBG berpotensi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, di mana manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi di tangan segelintir pihak, melainkan tersebar lebih merata ke berbagai lapisan masyarakat.²⁰

Namun demikian, perwujudan efek pengganda ini sangat bergantung pada desain implementasi program. Apabila pengadaan bahan baku program didominasi oleh importir atau korporasi besar yang tidak terafiliasi dengan ekosistem pangan lokal, maka manfaat ekonomi yang dihasilkan akan jauh berkurang. Oleh karena itu, komitmen untuk memberdayakan produksi pangan lokal bukan sekadar slogan, melainkan syarat substantif agar efek pengganda ekonomi benar-benar terwujud.²¹

3. Analisis Biaya: Antara Kebutuhan dan Tantangan Fiskal

Dari sisi biaya, program MBG memang membutuhkan komitmen anggaran yang sangat besar. Alokasi anggaran Rp71 triliun pada tahun 2025 bukanlah angka kecil, dan proyeksi peningkatan anggaran hingga Rp268 triliun pada tahun 2026 menandai salah satu ekspansi program sosial terbesar dalam sejarah fiskal Indonesia. Pertanyaan yang muncul kemudian bukan hanya soal apakah angka ini layak, tetapi juga bagaimana memastikan setiap rupiah dari anggaran tersebut memberikan manfaat yang setimpal.

Risiko kebocoran anggaran dan ketidaktepatan sasaran menjadi tantangan yang nyata. Pengalaman dari berbagai program bantuan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa program dengan skala besar kerap rentan terhadap persoalan tata kelola, mulai dari data penerima yang tidak mutakhir hingga potensi penyimpangan dalam pengadaan.²²

Selain itu, biaya logistik dan distribusi di negara kepulauan seperti Indonesia tidak bisa diremehkan. Menjangkau sekolah-sekolah di daerah terpencil, dengan kondisi infrastruktur yang masih terbatas, membutuhkan strategi distribusi yang cermat dan tidak murah. Tanpa perencanaan logistik yang matang, efisiensi program bisa tergerus secara signifikan.²³

¹⁸Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 'Visi Indonesia 2045', Jakarta: Bappenas, 2019, hlm. 33.

¹⁹INDEF, 'Efek Pengganda Program Makan Bergizi Gratis', Jakarta: INDEF, 2024, hlm. 15.

²⁰Asian Development Bank, 'Fostering Local Economic Development through Social Programs: Evidence from Southeast Asia', Manila: ADB, 2023, hlm. 44.

²¹Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, 'SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset', Jakarta: Salemba Empat, 2011, sebagaimana dikutip dalam konteks analisis dampak program sosial.

²²Transparency International Indonesia, 'Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024', Jakarta: TII, 2024.

²³Komisi Pemberantasan Korupsi, 'Kajian Pencegahan Korupsi pada Program Bantuan Sosial', Jakarta: KPK, 2023, hlm. 22.

Dimensi lain yang perlu dicermati adalah biaya standarisasi menu dan jaminan kualitas gizi. Program MBG tidak hanya dituntut menyediakan makanan yang mengenyangkan, tetapi harus memenuhi standar gizi tertentu yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Pengawasan kualitas ini memerlukan sistem pemantauan yang memadai, yang pada gilirannya juga membutuhkan sumber daya tersendiri.²⁴

4. Manfaat Jangka Panjang dan Dimensi Return on Investment

Dalam analisis cost-benefit, salah satu tantangan terbesar adalah menghitung dan membandingkan manfaat yang baru akan terealisasi dalam jangka panjang dengan biaya yang harus dikeluarkan saat ini. Untuk program seperti MBG, horizon waktu yang relevan bisa mencakup dua hingga tiga dekade ke depan, mengingat manfaatnya yang paling signifikan baru akan tampak ketika generasi penerima program memasuki pasar kerja.

Studi Bank Dunia secara konsisten menunjukkan bahwa setiap tambahan satu tahun pendidikan berkualitas mampu meningkatkan pendapatan individu rata-rata sebesar 8-10 persen. Apabila program MBG berhasil mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan capaian belajar, maka dampaknya terhadap akumulasi human capital nasional dapat sangat substansial dalam jangka panjang.²⁵

Di sisi lain, perbaikan status gizi anak usia sekolah juga berimplikasi pada penurunan beban biaya kesehatan yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat di kemudian hari. Anak yang tumbuh dengan gizi baik memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit kronis di usia dewasa, seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung yang kesemuanya mengonsumsi porsi anggaran kesehatan yang tidak kecil.²⁶

Nilai manfaat ini, meskipun sulit dikuantifikasi secara presisi, dapat diperkirakan melalui pendekatan nilai sekarang bersih (net present value) dari aliran manfaat yang diproyeksikan sepanjang periode dampak program. Secara konseptual, apabila NPV manfaat program lebih besar dari NPV biaya yang dikeluarkan, maka program dapat dikategorikan layak secara ekonomi.²⁷

Yang tidak kalah penting adalah manfaat dalam dimensi ketahanan pangan dan kedaulatan gizi nasional. Dengan merangsang produksi pangan lokal melalui program MBG, pemerintah secara tidak langsung memperkuat fondasi ketahanan pangan Indonesia, yang menjadi semakin krusial di tengah ketidakpastian pasokan pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim dan ketegangan geopolitik.²⁸

5. Tata Kelola, Transparansi, dan Keberlanjutan Program

Tidak ada program yang bagus di atas kertas yang dapat memberikan manfaat optimal apabila tata kelolanya lemah. Dalam konteks program MBG, aspek tata kelola mencakup setidaknya empat dimensi utama: perencanaan anggaran yang realistis, sistem pengadaan yang transparan dan kompetitif, mekanisme distribusi yang efisien, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang independen.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi prasyarat dasar yang tidak bisa diabaikan. Pengalaman menunjukkan bahwa program-program besar yang tidak dilengkapi

²⁴BPS, 'Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2024', Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.

²⁵World Bank, 'Returns to Investment in Education: A Further Update', Education Economics, Vol. 12, No. 2, 2004, hlm. 111-134.

²⁶Lukmanul Hakim, 'Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah di Indonesia', Jurnal Gizi Klinik Indonesia, Vol. 15 No. 2, 2018, hlm. 78.

²⁷Nicholas Stern, 'The Economics of Climate Change: The Stern Review', Cambridge University Press, 2007, hlm. 27 — konsep ini diadaptasi untuk menilai nilai manfaat jangka panjang dari investasi sumber daya manusia.

²⁸FAO, 'The State of Food and Agriculture 2023: Revealing the True Cost of Food', Rome: FAO, 2023, hlm. 41.

dengan mekanisme pengawasan yang memadai cenderung rawan terhadap berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari mark-up harga hingga manipulasi data penerima manfaat.²⁹

Keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam pengawasan program juga merupakan elemen penting yang sering diabaikan. Model pengawasan partisipatif, di mana komunitas lokal dilibatkan secara aktif dalam memantau kualitas dan ketepatan distribusi, terbukti efektif dalam meminimalisasi kebocoran program di berbagai konteks internasional.³⁰

Dari sisi keberlanjutan fiskal, perlu dipikirkan secara serius bagaimana program ini akan dibiayai dalam jangka panjang tanpa mengorbankan prioritas belanja publik lainnya. Inovasi skema pembiayaan, termasuk kemungkinan kemitraan dengan sektor swasta melalui mekanisme CSR yang terstruktur atau obligasi dampak sosial (social impact bonds), bisa menjadi alternatif yang layak untuk dikaji lebih lanjut.³¹

Aspek keberlanjutan juga menyangkut dimensi nutrisi itu sendiri. Program ini perlu dirancang agar tidak hanya memenuhi kebutuhan kalori semata, tetapi benar-benar memenuhi standar gizi yang komprehensif, dengan mempertimbangkan keragaman kebutuhan gizi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi geografis. Standardisasi menu yang kaku tanpa mengakomodasi keragaman budaya dan ketersediaan bahan pangan lokal bisa kontraproduktif dan mengurangi tingkat penerimaan program di masyarakat.

KE S I M P U L A N

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis yang memiliki relevansi kuat dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, program ini memberikan manfaat yang bersifat multidimensional, mencakup peningkatan kualitas gizi peserta didik, perbaikan capaian pendidikan, kontribusi terhadap kesehatan jangka panjang, serta efek pengganda ekonomi yang menggerakkan berbagai sektor produktif.

Melalui perspektif cost-benefit analysis, dapat disimpulkan bahwa manfaat jangka panjang yang berpotensi dihasilkan program MBG dalam bentuk peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan beban biaya kesehatan, dan akselerasi pembangunan human capital cenderung lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan saat ini, sepanjang program dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan tepat sasaran.

Namun demikian, keberhasilan program ini tidak bisa dianggap otomatis. Tantangan dalam hal tata kelola anggaran, logistik distribusi, standar kualitas gizi, serta keberlanjutan fiskal merupakan hambatan nyata yang membutuhkan perhatian serius. Program MBG baru dapat benar-benar menjadi investasi sosial yang menghasilkan, apabila didukung oleh sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang terukur.

Saran

Pertama, pemerintah perlu memperkuat arsitektur tata kelola program MBG sejak dari perencanaan hingga evaluasi. Sistem verifikasi data penerima manfaat yang akurat, mekanisme pengadaan yang transparan, serta audit berkala oleh lembaga independen harus menjadi standar minimum dalam pengelolaan program ini.

Kedua, efisiensi distribusi perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk sistem monitoring berbasis data real-time yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan maupun hambatan logistik di lapangan.

Ketiga, sinergi dengan pelaku ekonomi local terutama petani, peternak, dan UMKM

³⁰Arief Anshory Yusuf, 'Distributional Impact of Government Programs: Indonesia Case Study', Working Paper Padjajaran University, 2022.

³¹OECD, 'How's Life? 2023: Measuring Well-Being', Paris: OECD Publishing, 2023, hlm. 89.

perlu diperkuat secara sistematis. Hal ini tidak hanya meningkatkan efek pengganda ekonomi program, tetapi juga memastikan bahwa rantai pasok yang terbangun memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap guncangan eksternal.

Keempat, evaluasi program secara berkala dengan menggunakan indikator yang terukur dan berbasis bukti perlu dilembagakan. Hasil evaluasi ini menjadi basis penting bagi pengambil kebijakan untuk melakukan penyesuaian yang responsif terhadap dinamika implementasi di lapangan.

Kelima, kajian akademis lanjutan yang secara khusus mengkuantifikasi return on investment program MBG dalam jangka menengah dan panjang sangat diperlukan. Studi longitudinal yang melibatkan penerima manfaat program dapat memberikan bukti empiris yang lebih kuat untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan berbasis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Alderman, H., & Headey, D. (2017). The relative nutritional importance of different expenditures on children under two. *Economics & Human Biology*, 26, 18-27.
- Andita Ratih dan Gisela Adio Ros Maria. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Kebijakan Pendukung Pendidikan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ekspos*, 3(2).
- Anifani Kiftiyah, dkk. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik. *Jurnal Pancasila*, 5(1).
- Asian Development Bank. (2023). *Fostering Local Economic Development through Social Programs: Evidence from Southeast Asia*. Manila: ADB.
- Badan Gizi Nasional. (2025). *Tiga Kunci Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis: Anggaran, SDM, dan Infrastruktur*. Jakarta: BGN.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Bappenas. (2019). *Visi Indonesia 2045*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Becker, G. S. (1994). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Boardman, A. E., Greenberg, D. H., Vining, A. R., & Weimer, D. L. (2018). *Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice* (5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Eddy Cahyono Sugiarto. (2024). *Makan Bergizi Gratis dan SDM Unggul*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.
- FAO. (2023). *The State of Food and Agriculture 2023: Revealing the True Cost of Food*. Rome: FAO.
- Febryliana Pratiwi, dkk. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai Strategi Investasi Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kesehatan dan Kualitas Pendidikan. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1).
- Glewwe, P., & Kremer, M. (2006). Schools, Teachers, and Education Outcomes in Developing Countries. Dalam E. Hanushek & F. Welch (eds.), *Handbook of the Economics of Education*, Vol. 2. Amsterdam: Elsevier.
- Heckman, J. (2006). Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children. *Science*, 312, 1900-1902.
- Heni Jusuf dan Lijan Poltak Sinambela. (2026). Human Resource Capacity in Global School Feeding Program: Lesson for Indonesia's MBG Policy. *IJSSHR*, 9.
- INDEF. (2024). *Efek Pengganda Program Makan Bergizi Gratis*. Jakarta: INDEF.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Keuangan RI. (2025). *Nota Keuangan APBN 2025*. Jakarta: Kemenkeu.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Kajian Pencegahan Korupsi pada Program Bantuan Sosial*. Jakarta: KPK.
- Lukmanul Hakim. (2018). Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah di Indonesia. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 15(2), 78.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miki, G. N., Kiboi, W. K., Ohuma, E. O., et al. (2026). Effectiveness and Cost-Effectiveness of School Meals Programmes. *BMJ Global Health Protocol*, 16(8).
- Natali Tan. (2025). *Peluang Usaha di Balik Program Makan Bergizi Gratis Nasional*. Legalitas.org.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- OECD. (2023). *How's Life? 2023: Measuring Well-Being*. Paris: OECD Publishing.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Stern, N. (2007). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Topik Hidayat. (2026). *Update Anggaran MBG 2026: Rincian Resmi Rp268 Triliun dan Aturan Baru*.
- Transparency International Indonesia. (2024). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024*. Jakarta: TII.
- UNESCO. (2023). *Education for All Global Monitoring Report*. Paris: UNESCO.
- UNICEF. (2024). *The State of the World's Children 2024: The Future of Childhood in a Changing World*. New York: UNICEF.
- World Bank. (2004). *Returns to Investment in Education: A Further Update*. *Education Economics*, 12(2), 111-134.
- World Food Programme. (2023). *State of School Feeding Worldwide 2023*. Rome: WFP.
- Yosef Keladu, dkk. (2026). *Program Makan Bergizi (MBG) di Era Kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam Perspektif Amartya Sen*. *Jurnal Politeia*, 18(1).
- Yusuf, A. A. (2022). *Distributional Impact of Government Programs: Indonesia Case Study*. Working Paper Padjajaran University.